



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KARIMIN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **503996**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 932.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/77 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 1.976 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 6.000 m2/153 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah Seluas 6.400 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 132.000.000
5. Tanah Seluas 40.000 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 6.840 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
7. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
8. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, WARISAN Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 51.000.000

1. MOTOR, HONDA REPSOL 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOTOR, HONDA TRAIL/T4G02T31L Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 189.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.806.460

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.202.806.460

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.202.806.460

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.